



ABSTRAKSI

Tulisan ini menjelaskan tentang keputusan Indonesia untuk tetap melanjutkan eksekusi mati terhadap tersangka kasus narkoba yang sebagian besar merupakan warga negara asing. Hal ini dilatar belakangi oleh anggapan bahwa Indonesia telah mengalami krisis narkoba dan narkoba jugalah yang telah membunuh puluhan remaja Indonesia setiap bulannya, sehingga pelaku penyelundupan narkoba harus dihukum seberat-beratnya, agar menimbulkan efek jera bagi siapapun yang berniat untuk mengedarkan narkoba di Indonesia. Namun keputusan Indonesia ini menuai protes yang sangat keras dari dunia internasional. Australia, Prancis, dan Brazil mengecam tindakan Indonesia yang dianggap merupakan perampasan terhadap hak hidup manusia. Beberapa negara tersebut menyesali sikap dari pemerintah Indonesia yang enggan memberikan grasi agar warga negara dari ketiga negara tersebut terlepas dari jerat hukuman mati. Australia dan Brazil bahkan menarik duta besar mereka dari Indonesia, reaksi lebih keras ditunjukkan oleh Brazil yang menolak duta besar baru dari Indonesia, sehingga harus dipulangkan.

Meskipun hal ini sangat merugikan bagi Indonesia secara bilateral, namun Indonesia tidak sedikitpun melunakkan sikapnya dengan terus melanjutkan proses hukum para tersangka tersebut dan berulang kali mengacuhkan protes dari negara-negara tersebut terkait hukuman mati yang masih dijalankan. Pemerintah Indonesia selalu beranggapan bahwa penerapan hukuman mati merupakan usaha dalam menurunkan tingkat kriminalitas di Indonesia. Berulang kali pula permohonan banding seperti uji materi dan peninjauan kembali serta permohonan grasi diajukan namun selalu ditolak, sehingga nasib para tersangka kasus narkoba tersebut berakhir dalam eksekusi mati.

Penulis dalam karya ini akan menjelaskan tentang bagaimana kejadian-kejadian yang telah dijabarkan diatas merupakan sebuah upaya yang sarat akan nilai-nilai realisme didalamnya dan bukanlah murni sebuah upaya untuk menegakkan hukum ataupun Hak Asasi Manusia seperti yang banyak diserukan oleh negara-negara yang terlibat dalam dinamika kasus hukuman mati tersebut.



ABSTRACT

This paper explains Indonesia's decision to continue the death execution of suspected cases of drugs that are mostly foreign citizens. This is based on the assumption that Indonesia has experienced drug and drug crisis that has killed dozens of Indonesian teenagers every month, so that drug smugglers must be severely punished, in order to create a deterrent effect for anyone intending to distribute drugs in Indonesia. However, this Indonesian decision reap a very strong protest from the international world. Australia, France, and Brazil condemn Indonesia's actions that are considered a plunder to the right to human life. Some of these countries regret the attitude of the Indonesian government that is reluctant to grant pardons to the citizens of the three countries apart from the death penalty trap. Australia and Brazil even withdrew their ambassadors from Indonesia, a stronger reaction was shown by Brazil that rejected Indonesia's new ambassador, so it had to be repatriated.

While this is very detrimental for Indonesia bilaterally, Indonesia does not in any way soften its stance by continuing the legal process of the suspects and repeatedly ignoring protests from those countries regarding the death penalty that is still being executed. The Indonesian government has always assumed that the application of capital punishment is an attempt to reduce crime rates in Indonesia. Also repeated appeals such as material review and review and pardon requests are filed but always rejected, so that the fate of suspects in drug cases ends in execution.

The writer in this work will explain how the events described above are an effort that is full of realism values in it and is not purely an attempt to uphold the law or human rights as many countries called for in dynamics The death penalty case.